

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PANDULANGAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Norlaili Adhayati¹, Arif Budiman², M.Fajar Noorrahman³

Program Studi Administrasi Amuntai

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: norlaili2213@gmail.com

ABSTRAK

Sebuah PKH di Desa Pandulangan Kec. Sei Pandan. Berdasarkan observasi awal dan data yang diperoleh maka dapat dilihat fenomena permasalahan yaitu kurang dalam menjalankan program PKH sangat penting adanya dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran KPM, tidak tepat sasaran dan dana diberikan tidak sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (2) pelayanan pemerintah pusat di desa pandulangan (3) manfaat PKH terhadap masyarakat desa pandulangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum efektif, dapat dilihat dari fenomena permasalahan yang masih belum efektif. (2) faktor pendukung, tujuan dari PKH dirancang untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami masalah keluarga. (3) faktor penghambat, kurangnya tepat sasaran KPM. Untuk meningkatkan PKH disarankan kepada pihak terkait agar meningkatkan komunikasi kepada para pengelola PKH, kepada kepala desa pandulangan kec.sungai pandan diharapkan lebih meningkatkan lagi pemahaman untuk program PKH dan kepada tim verifikasi agar bisa terlebih dahulu mengkoordinasi dengan pihak desa untuk melakukan kegiatan acara sosialisasi dari dinas terkait.

Kata Kunci: Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRACT

Family Hope Program (PKH) in the village of Pandulangan, Pandan River district. Based on the results of the initial observations and the data obtained, it is possible to identify the phenomenon of the problem the lack of implementation of the PKH program is very important in this research due to lack of awareness of the KPM, inappropriate targeting. And the funds given are inappropriate. This research is aimed at (1) improving the well-being of the village people (2) the central government services in the village Guide (3) the benefits of PKH for the village community Guide. The data collection techniques used are observations, interviews and documentation. The results of the research show that (1) Effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in the village of Pandulangan River Pandan district of Hulu River North phenomenon problems that are still not effective. (2) The supporting factor, the goal of the PKH is designed to help increase public awareness will be the importance of understanding the family problems. (3) The inhibitor factor, less accurate targets of the KPM. To improve PKH, it is recommended to the parties concerned to improve communication to the management of the PCH, to the village head of the department and to the verification team, is expected to increasingly improve understanding of the program and the team so that they can coordinate first with the villages to carry out socialization activities from the relevant ministry.

Keyword: Effectiveness of the Hope Family Program (PKH) in the North River Hulu district of Pandan River

PENDAHULUAN

Sektor pelayanan publik. Bagaimana tidak, pasca-pembentukan daerah otonom baru yang seharusnya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena jarak semakin dekat, yang berarti pelayanan menjadi semakin cepat, dalam kenyataannya menjadi semakin jauh karena pelayanan menjadi semakin lama. (Muhammad Alfisyahrin, 2017)

Efektivitas kinerjanya dalam hal ini adalah kompetensi seorang dosen yang berkaitan dengan kinerja serta memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu yang pada akhirnya akan mempengaruhi efektivitas organisasi (Fahmi Jahida Islamy, 2021)

Kemiskinan adalah permasalahan mendasar yang terjadi pada seseorang maka harus diselesaikan. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis dan sistematis agar seluruh masyarakat dapat menikmati kehidupan yang bermartabat. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga pada dimensi sosial, budaya, politik, pendidikan, bahkan juga sampai pada tingkat ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial (BANSOS) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sangat membutuhkan. PKH didefinisikan sebagai BANSOS ditujukan kepada keluarga yang kurang mampu untuk terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Data ini diolah oleh pusat data dan penerima manfaat tetap berdasarkan kriteria tertentu.

Di Indonesia hal itu dibuktikan dalam dasar negaranya yaitu Pancasila, yang mengamatkan dalam sila ke limanya yaitu *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Berdasarkan sila tersebut negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Bukan hanya ada di dasar negara, saking pentingnya kesejahteraan masyarakat, di dalam UUD pun juga diatur masalah kesejahteraan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan bertujuan untuk menuntaskan masalah kesejahteraan dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan rentan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong penerima manfaat untuk memenuhi berbagai persyaratan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti memastikan anak-anak bersekolah, memeriksakan kesehatan keluarga secara rutin, dan mengikuti berbagai program pelatihan keterampilan.

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah berharap dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi dan mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dan sejahtera.

PKH adalah inisiatif bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga kurang mampu di Indonesia. Program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin dari dampak kondisi krisis dan sebagai jaring pengaman sosial. PKH dirancang untuk membantu memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan kondisi pendidikan dan KPM. Dengan

perbaikan di kedua bidang tersebut, diharapkan anak-anak dari keluarga penerima PKH akan memiliki kesempatan kerja yang lebih baik di masa depan. (Nyi R Irmayani, 2019)

Meningkatkan efektifitas tujuan PKH dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Sedangkan untuk meningkatkan inklusifitasnya, dari sisi jumlah penerima manfaat, diharapkan jumlah cakupan penerima bansos PKH bisa bertambah atau sama dengan jumlah keluarga miskin dan rentan miskin di Indonesia akibat bencana alam, guncangan ekonomi, guncangan sosial maupun wabah penyakit, yang mana hal ini perlu didukung oleh basis data yang andal. (*Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Kenegara Kesetariat Jendral dan Badan Keahlian DPR RI, 2020*)

Kemiskinan adalah permasalahan mendasar yang terjadi pada seseorang maka harus diselesaikan. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis dan sistematis agar seluruh masyarakat dapat menikmati kehidupan yang bermartabat. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga pada dimensi sosial, budaya, politik, pendidikan, bahkan juga sampai pada tingkat ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya. Kehidupan di era millenium merupakan sebuah jaman yang ditandai oleh modernisasi, kemajuan peradaban dan kualitas hidup manusia. Bangsa Indonesia sudah saatnya harus terlibat dan ikut berpacu untuk bersaing pada era globalisasi. Jaman inilah yang harus dilalui oleh siapapun yang hidup di abad 21 dimana sarat dengan berbagai macam kepentingan dan kompetisi yang pemenangnya ditentukan pada kualitas (human resources) atau sumber daya manusia.

Tugas dan Fungsinya Pendamping PKH adalah sebagai berikut:

- a. Kesehatan dan Masyarakat Umum.
- b. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan awal dan validasi calon KPM PKH.
- c. Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan setiap bulannya.
- d. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan.
- e. Memfasilitasi akses kepada layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan kesejahteraan sosial kepada anggota keluarga KPM PKH.
- f. Memfasilitasi dan melakukan penganganan masalah dan pengaduan KPM PKH.
- g. Melakukan pendampingan KPM PKH untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban kehadiran pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan.
- h. Melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh KPM PKH.
- i. Melakukan mediasi, fasilitas dan advokasi kepada KPM PKH untuk mendapatkan bantuan PKH dan bantuan dari program-program meliputi KKS, KIS, KUBE/UEP, RASTRA, Rumah Tinggal Layak Huni, Subsidi Energi, serta bantuan dari program lainnya.

Mengetahui mensiasati masalah yang dialami Desa Pandulangan maka disalurkan bantuan sosial PKH sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Pandulangan. Pelaksanaan PKH di Desa Pandulangan baru masuk pada tahun 2012 silam. Dalam

penyalurannya Kementerian Sosial mengutus pendamping PKH untuk mendata sekaligus mendampingi keluarga miskin yang nantinya menjadi KPM. Program Keluarga Harapan yang diimplementasikan di Desa Pandulangan diharapkan mampu menjawab setiap permasalahan kesejahteraan yang dialami Desa Pandulangan.

Yang termasuk golongan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut yaitu Desa Pandulangan. Desa ini merupakan target yang tepat untuk penyaluran bantuan PKH karena Desa Pandulangan masih tergolong sebagai desa tertinggal. Permasalahannya pencaharian masyarakat masih kurang menjamin ekonomi hidup yang layak.

Jumlah KPM pada 2017 sebanyak 6.228.810 KPM seluruh Indonesia.

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah KPM yang cukup tinggi yaitu menjadi 10.000.232 KPM. Selanjutnya pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah KPM menjadi 9.841.270. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan jumlah KPM menjadi 10.000.000 KPM.

Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH. Bansos 2023 ini telah dibuka pemerintah sejak tahun 2007 dan terus berupaya meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan. Melalui PKH 2023, masyarakat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial yang ada, termasuk akses pendidikan, kesehatan, pangan, gizi, perawatan, dan program perlindungan lainnya. Jadi, nominal PKH 2023:

1. **Ibu hamil** akan mendapatkan Rp750.000 untuk setiap tahap atau Rp3 juta per tahunnya.
2. **Anak usia dini/balita** Rp750.000 untuk setiap tahap atau Rp3 juta per tahunnya.
3. **Lansia** akan mendapatkan Rp600.000 untuk setiap tahap atau Rp2,4 juta per tahunnya.
4. **Disabilitas** Rp600.000 untuk setiap tahap atau Rp2,4 juta per tahunnya.
5. **Anak sekolah SD** Rp225.000 untuk setiap tahap atau Rp900 juta per tahunnya.
6. **Anak sekolah SMP** Rp375.000 untuk setiap tahap atau Rp1,5 juta per tahunnya.
7. **Anak sekolah SMA** Rp500.000 untuk setiap tahap atau Rp2 juta per tahunnya.

Sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu tempat yang banyak tambahan jumlah calon penerima PKH di Kalsel. PKH yang dilaksanakan di Hulu Sungai Utara digadang-gadang bisa menuntaskan masalah kesejahteraan yang dialami masyarakat.

Hasil observasi didapatkan, terdapat beberapa masalah yang menyebabkan PPKH di Desa Pandulangan belum berjalan maksimal. Pertama, ada KPM yang sudah sejahtera tetapi belum mau mengundurkan diri secara baik sebagai penerima bantuan. Hal ini menyebabkan bantuan yang seharusnya diterima oleh keluarga yang lebih membutuhkan menjadi tidak tepat sasaran.

Observasi awal melakukan di desa pandulangan maka di dapat permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam penggunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagaimana tujuan awal dari program tersebut. Tujuan

awal pemberian dana PKH adalah untuk pemanfaatan ke Akses (Fasilitas Kesehatan), (Fasilitas Pendidikan), dan (Kesejahteraan Sosial), sedangkan pada Desa Pandulangan terdapat masyarakat yang telah menggunakan dana PKH tidak sesuai dengan yang semestinya, yang awalnya dana itu diberikan untuk pemanfaatan Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial, tetapi malah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di luar dari tujuan awal yang ditentukan oleh Program PKH tersebut sehingga berdampak pada kurangnya efisiensi pendanaan PKH yang diberikan. (*Sumber Data: Jumlah laporan bantuan dari dana PKH*).

2. Tidak tepatnya sasaran dalam penerima bantuan PKH dikarenakan masih ada orang-orang di kalangan beres (atas). yang mendapatkan dana bantuan yang seharusnya dana tersebut untuk kalangan bawah, dan masih saja ada masyarakat miskin yang diabaikan. (*Sumber Data: Penerimaan Manfaat PKH Desa Pandulangan*).
3. Pemberian dana PKH belum memberikan pengaruh terhadap perbaikan dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang kesejahteraan sosial. karena kita sedang dalam kesenjangan dan ketimpangan terhadap itu semua, dengan adanya bantuan dana PKH diharapkan akan mengurangi permasalahan tersebut. (*Sumber Data : Pedoman Umum PKH 2021*).

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pembangunan Ilmu administrasi publik khususnya terkait dengan Efektivitas Program Keluarga Harapan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam hal pengefektifan Program Keluarga Harapan di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Serta sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya.

METODE

Lokasi Penelitian dilakukan pada Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena merupakan tempat tinggal peneliti, sehingga dapat memudahkan peneliti mencari data.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu pendekatan yang dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala sedemikian rupa.

Pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan disusun berdasarkan pada hasil penelitian dengan menelaah dan informasi yang diperoleh dengan menggali fakta-fakta yang ada di lapangan dan menggambarkan secara sistematis dan faktual kemudian dari fakta-fakta tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan fokus penelitian yang dibahas.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada

kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknis pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini dilakukan pada Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena merupakan tempat tinggal peneliti, sehingga dapat memudahkan peneliti mencari data. Tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Ada berbagai metode yang dapat digunakan, metode yang akan dipilih peneliti harus sesuai dan berhubungan dengan prosedur Efektivitas PKH Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam menganalisa data lapangan, yang paling utama dilakukan adalah peneliti menggunakan deskriptif data kualitatif dengan alasan untuk mengetahui secara mendetail dan mendalam mengenai Efektivitas PKH di Desa Pandulangan Kec. Sei Pandan Kab. HSU.

Metode pengumpulan dan menggunakan metode teknik: wawancara mendalam dilakukan dengan cara Purposive Sampling (pengambilan sampel secara sengaja) dengan para informan, observasi lapangan berlangsung, dokumentasi berupa foto-foto penelitian dalam kegiatan penelitian saat dilapangan. Teknik analisis data dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pada umumnya, setiap pemerintahan dimanapun memiliki sistem pelayanan publiknya tersendiri, hal ini terkait dengan seberapa baik mutu pelayanan tersebut dan apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Orientasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya adalah masyarakat sebagai penerima hak pelayanan. Jika mencapai apa yang menjadi tujuan, besar kemungkinan keberhasilan tersebut dapat diraih. Tentu dengan proses dan hasil yang baik sehingga masyarakat mendapatkan kepuasannya terhadap pelayanan publik di daerahnya. Pelayanan publik merupakan salah satu sistem administrasi negara Indonesia dan merupakan hal sangat berkaitan.

Efektivitas kepentingan dan kemampuan Pemimpin dalam menetapkan dan mengatur sumber daya, bagi pencapaian tujuan organisasi, maka pemilihan tujuan ini menjadi faktor yang sangat kritis. Pengertian penetapan tujuan meliputi identifikasi tujuan organisasi yang berlaku umum dan penetapan berbagai bagian kelompok individu dapat memberikan sumbangan bagi tujuan-tujuan ini. Bila terdapat tujuan bersama yang ditetapkan ini diantara para pekerja kemungkinan tingkat usaha yang tinggi bagi tujuan, cenderung meningkat.

Penduduk Kecamatan Sungai Pandan berdasarkan registrasi penduduk tahun 2022 sebanyak 28.829 jiwa. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 14.396 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan ada sebanyak 14.443 merupakan penduduk perempuan. Serta dalam hal ini Kecamatan Sungai Pandan termasuk Kecamatan yang memiliki SDM, dan begitupula dengan tingkat kemiskinan yang ada di Kecamatan Sungai Pandan sehingga banyak memiliki KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH.

Hasil penelitian serta kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas PKH Di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai

Utara kurang efektif. Adapun aspek yang efektif yaitu: *Pertama*, pada indikator Pencapaian sasaran program belum efektif karena masih banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi mereka tidak mendapatkannya. *Kedua*, kepuasan terhadap program belum efektif karena kepuasan masyarakat Sebagian tidak merasa puas. *Ketiga*, pemahaman program belum efektif karena kurangnya sosialisasi yang diberikan pelaksana kepada masyarakat. *Keempat*, Sosialisasi program belum efektif karena kurangnya memahami sosialisasi yang diberikan pelaksana kepada masyarakat. *Kelima*, akses Pendidikan sudah cukup efektif karena berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. *Keenam*, akses Kesehatan belum efektif karena masyarakat kurang peduli dengan akses Kesehatan dari program. *Ketujuh*, kesejahteraan sosial kurang efektif karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu dalam kesejahteraan sosial dari PKH. *Kedelapan*, peningkatan kemampuan belum efektif karena ketidak setaraan tentang peningkatan kemampuan masyarakat yang masih kurang pemahaman oleh pihak instansi. *Kesembilan*, manfaat program efektif karena masyarakat sangat terbantu dengan adanya program PKH. *Kesepuluh*, evaluasi program belum efektif karena kurangnya evaluasi dari pihak pelaksana terhadap PKH.

2. Faktor penghambat Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu: *Pertama*, kurangnya pendataan oleh pihak instansi ke masyarakat sehingga ada sebagian masyarakat desa khususnya desa pandulangan sebagian yang masih belum mendapatkan bantuan program PKH ini. *Kedua*, kurangnya anggaran dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pengelolaan program PKH di Desa Pandulangan mengakibatkan para pengelola program PKH tidak bisa berbuat apa-apa terhadap masyarakat yang kurang dengan dana tersebut. *Ketiga*, kurangnya keterlibatan pihak pelaksana antar masyarakat desa pandulangan dalam menentukan sasaran. Adapun faktor yang mendukung Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah bagi masyarakat yang kurang mampu bisa bermanfaat bagi perekonomian dalam kehidupan sehari-hari berkat bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Melalui analisis dengan teori Budiani dalam (Partiwi Monica, 2017) menyatakan bahwa untuk mengukur Efektivitas menggunakan beberapa variabel, faktor mempengaruhi Efektivitas PKH di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi:

1. Faktor Pengaruh

Faktor penghambat berjalannya PKH di Desa Pandulangan Kec. Sei Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara

- a. Kurang Tepat Sasaran
- b. Dana KPM yang tidak sesuai tujuan awal
- c. Kurangnya keterlibatan pihak pelaksana dengan Masyarakat

2. Faktor Pendukung

Faktor yang pendukung berjalannya PKH di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara

- a. Peningkatan Kesejahteraan
- b. Pelayanan Pemerintah Pusat

c. Manfaat Program

SIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menangani tentang masalah PKH agar lebih meningkatkan komunikasi kepada para pengelola program keluarga harapan di desa pandulangan supaya berjalan dengan lancar serta tepat sasaran dalam penentuan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Kepada Kepala Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara agar lebih meningkatkan komunikasi kepada pihak instansi terkait bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu pelaksana harus meningkatkan pemahaman masyarakat di Desa Pandulangan masih kurang memahami PKH ini apa yang sudah dilaksanakan di desa tersebut.
3. Kepada tim verifikasi penentuan program PKH agar melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pihak desa mengenai PKH ini perlu adanya sosialisasi lebih mendalam dan perlu berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak masyarakat desa khususnya kepala desa dan pengelola PKH di desa Pandulangan agar terlaksana dengan baik. Selain itu diharapkan lebih teliti lagi dalam penentuan anggaran dana yang diperlukan pihak pelaksana supaya program yang saat ini dijalanannya tidak terbengkalai dan berjalan dengan sendirinya sehingga pihak desa bingung sendiri tanpa ada dampingan dari pihak verifikasi PKH.
4. Untuk para masyarakat bisa memanfaatkan bantuan PKH ini untuk sukses Efektivitas dalam PKH di desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Kepada peneliti selanjutnya sekiranya bisa melengkapi lagi kekurangan yang masih ada di desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang saya teliti ini, agar lebih ditingkatkan lagi kedepannya mengenai beberapa hal unuk data masyarakat yang kurang mampu sekiranya bisa lebih efektif dari beberapa faktor yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.



Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Fahmi Jahida Islamy (2021) *Efektivitas Organisasi Berbasis Manajemen Pengetahuan Dalam Perspektif Perilaku Organisasi*. Edited by Fahmi Jahida Islamy. Ponorogo: Fahmi Jahida Islamy.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Muhammad Alfisyahrin (2017) *Peningkatan Kualitas pelayanan publik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nyi R Irmayani (2019) *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Peningkatan Kemampuan Keluarga*. Edited by Nyi R Irmayani. Jakarta Timur: Publibangkesos Kementerian Sosial RI.

Partiwi Monica (2017) 'Efektivitas Program BPJS Kesehatan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan Di Puskesmas Sronдол)', *Jurnal Of Public Policy and Management Review Undip*, 6(2).

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Kenegara Kesetariat Jendral dan Badan Keahlian DPR RI (2020). Akuntabilitas Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH).

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAL TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.



Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.